

Pengaruh Kelayakan Hidup Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 10 Provinsi Termiskin Di Indonesia

Eliza Clara Yeremia Sagala ^{1)*}, Masruri Muchtar²⁾, Pardomuan Robinson Sihombing³⁾

¹⁾²⁾ Prodi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

³⁾ Badan Pusat Statistik, Indonesia

* E-mail corresponding author: eliza.sagala@kemenkeu.go.id

Ecoplan

Submitted: Jan 25, 2024

Accepted: Apr 01, 2024

Published: Apr 29, 2024

Keywords: Human Development Index; Gross Regional Domestic Product; Poorest Province; Poverty Rate; Provincial Minimum Wage

Abstract - To get out of the Middle-Income Trap, Indonesian economic growth must be consistently above 6% annually. In addition, the reduction in poverty rates is also an important indicator that Indonesia will emerge from this trap. The study aims to determine the impact of Provincial Minimum Wage (UMP), Gross Regional Domestic Product (PDRB), and Human Development Index (IPM) on Poverty Rate in the ten poorest provinces in Indonesia. Using data from the Badan Pusat Statistik for 2012-2022, this research adopts linear regression of multiple data panels. The results show that all variables simultaneously affect the poverty rate significantly. Partially, UMP positively and significantly impacts the poverty rate, while IPM has a negative effect. PDRB has no significant influence on the poverty rate. It implies that the government should review the increase in UMP to stay at the point of balance. Economic growth must consider the level of well-being of all segments of society.

Abstrak - Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus konsisten di atas 6% per tahun untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap*. Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan juga indikator yang penting bagi Indonesia untuk keluar dari *trap* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendapatan Daerah Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan terhadap Tingkat Kemiskinan di 10 Provinsi termiskin di Indonesia. Menggunakan data dari Badan Pusat Statistik periode 2012-2022 dan metode penelitian asosiatif kuantitatif dengan regresi linier berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel berpengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sementara IPM berpengaruh negatif. PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menunjukkan bahwa pemerintah harus meninjau kenaikan UMP agar tetap pada titik keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan tingkat kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Domestik Regional Bruto; Provinsi Termiskin; Tingkat Kemiskinan; Upah Minimum Provinsi

PENDAHULUAN

Indonesia menargetkan untuk keluar dari *middle income trap* (MIT) pada tahun 2036, yang mana hal ini merupakan tantangan yang berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus konsisten di atas 6 persen per tahun (Puspita et al., 2022). Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan juga indikator yang penting bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*. Berdasarkan jurnal (Maryanti et al., 2023), Indonesia bisa keluar dari MIT dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7%. Dinyatakan dalam penelitian Agus Triono & Sangaji (2023), tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,5%. Adapun 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel 1. Penulis menggunakan data pada tahun 2022 agar sesuai dengan kondisi terkini. Untuk itu diperlukan upaya yang optimal oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1. Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi pada Tahun 2022

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)
Papua	26,68
Papua Barat	21,38
Nusa Tenggara Timur	20,14
Maluku	16,1
Gorontalo	15,465
Aceh	14,695
Bengkulu	14,48
Nusa Tenggara Barat	13,75
Sulawesi Tengah	12,315
Sumatera Selatan	11,925

Sumber: BPS (2023)

Prayoga (2021) menyatakan kemiskinan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti upah minimum yang tidak layak serta taraf hidup masyarakat yang rendah. Soal upah minimum, dalam penelitian yang dilakukan oleh Paramita Rastri (2021) menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan pekerja sehingga diharapkan tingkat kemiskinan dapat berkurang. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan variabel UMP untuk mengetahui langkah yang tepat bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yakni dengan menaikkan atau menurunkan UMP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Suman (2017) kenaikan upah minimum mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan. Serupa dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2016) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum menyebabkan tingkat kemiskinan bertambah. Hal ini dijelaskan oleh Pamungkas & Suman (2017) bahwa kenaikan UMP menyebabkan pengangguran meningkat sehingga tingkat kemiskinan semakin bertambah.

Taraf hidup masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Suryani et al. (2023), menyatakan hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Madan (2014) dan Prasetyoningrum (2018) menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan variabel IPM untuk mengetahui langkah yang tepat bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain kedua aspek di atas, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam pemahaman pertumbuhan ekonomi tradisional, terdapat argumen yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat akan berdampak buruk bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan terkadang pertumbuhan yang ada akan menyebabkan masyarakat miskin terlupakan dan dianggap tidak penting (*marginalized*) dalam perubahan struktural pertumbuhan modern (Todaro & Smith, 2012).

Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2016) menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Suryani et al., (2023) di Sumatera Utara bahwa peningkatan PDRB mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2012). Variabel PDRB menjadi sangat penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menaikkan tingkat kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu cenderung menyampaikan kenaikan upah minimum mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan, kenaikan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Walaupun terdapat kecenderungan penelitian namun beberapa penelitian yang disampaikan di atas masih ditemukan hasil yang beragam dan berbeda. Untuk itu pembahasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Pendapatan Domestik dan Regional Bruto, perlu dilakukan. Todaro & Smith (2012) menyatakan kaum marginal akan semakin tertinggal jika pertumbuhan ekonomi tumbuh begitu pesat. Banyak penelitian yang membahas mengenai variabel-variabel di atas namun masih terbatas yang fokus pada 10 provinsi termiskin di Indonesia sehingga penelitian ini berfokus pada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi gap penelitian yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kebutuhan dari sisi ekonomi seperti makanan dan bukan makanan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Isu kemiskinan sering menjadi topik utama dalam permasalahan suatu negara (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Penelitian ini menjadikan tingkat kemiskinan menjadi variabel dependen dimana variabel independen yang akan diteliti adalah Upah Minimum Provinsi, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Upah Minimum melalui Kementerian Tenaga Kerja. Pada tahun 2012 hingga 2022, UMP seluruh di Indonesia cenderung naik kecuali pada tahun 2020 dikarenakan dampak Covid-19. Upah Minimum disesuaikan dengan tujuan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak namun tetap memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Utomo, 2022). Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan oleh pelaku usaha atau industri untuk memberikan upah kepada pegawai di tempat usahanya. Upah yang diberikan biasanya dalam bentuk uang sebagai balasan atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan (Setiawan, 2014). Terdapat hubungan positif signifikan antara Upah Minimum dan tingkat kemiskinan (Campos-Vazquez & Esquivel, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia, menunjukkan kenaikan upah minimum juga mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan (Pamungkas & Suman, 2017).

Hubungan upah minimum dan tingkat kemiskinan juga dijelaskan dalam beberapa teori ekonomi. Salah satunya dalam teori *neoclassical*, respon perusahaan terhadap kenaikan upah adalah melakukan pemberhentian kerja atau mensubstitusi tenaga kerja dengan kemampuan yang lebih rendah sehingga dapat memberikan upah yang lebih rendah. Karena adanya pemberhentian kerja membuat tingkat pengangguran meningkat sehingga dampaknya kemiskinan pun juga meningkat (Giuliano, 2009). Argumen ini juga didukung oleh Todaro (2012) yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum di sektor formal akan menyebabkan jumlah pegawai yang diperkerjakan menjadi lebih sedikit, dampaknya mereka mencari pekerjaan ke sektor informal. Karena *supply* tenaga kerja di sektor informal bertambah akibatnya tingkat upah di sektor informal juga mengalami penurunan.

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan nilai tambah jasa atau barang dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Romhadhoni

et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Malaysia (Škare & Pržiklas Družeta, 2016) pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Sementara, yang dilakukan di Jawa Timur tahun 2008-2013 menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan (Aprilia, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian dalam dimensi utama pembangunan manusia seperti umur yang panjang, kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak. Pengukuran IPM salah satunya menggunakan pendekatan *Human Development* yang merupakan pendekatan yang berfokus pada manusia dan kemampuan mereka dalam menangkap peluang. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan membuat semua orang merasakan dampak dari pertumbuhan. Sehingga ketika *Human Development Index* seseorang rendah itu berarti sulit untuk merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Panjawa et al., (2023) dan Mukhtar et al., (2019) menyatakan bahwa IPM mempunyai hubungan signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Serupa dengan penelitian oleh Prasetyoningrum (2018) menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu kenaikan upah minimum dan PDRB mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan sementara kenaikan IPM mengakibatkan berkurangnya tingkat kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode asosiatif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan antar suatu variabel dependen dengan variabel independen. Sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan kurun waktu selama 11 tahun pada 2012-2022 di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Variabel Tingkat Kemiskinan Provinsi merupakan Persentase Penduduk Miskin. Menggunakan alat analisis berupa Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel dependen dan independen yang digunakan dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Dependen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
Tingkat Kemiskinan Provinsi	Persen	Rasio	-
Variabel Independen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
Upah Minimum Provinsi	Poin	Rasio	Logaritma Natural
Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	Rasio	-
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	Poin	Rasio	-

Sumber: Data diolah (2024)

Data diolah menggunakan aplikasi *Stata 18* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnUMP}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{IPM}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y_{it} = Tingkat Kemiskinan Provinsi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Upah Minimum Provinsi

β_2 = Koefisien Laju Pertumbuhan PDRB

β_3 = Koefisien Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

LnUMP_{it} = Upah Minimum Provinsi (poin)

PDRB_{it} = Laju Pertumbuhan PDRB (persen)

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (poin)

ε_{it} = Residual

Sebelum melakukan pemilihan model dan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan apakah parameter model bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) (Sihombing, 2021). Uji yang dimaksud berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi dengan detail pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	H0	H1
Skewness and Kurtosis Tests	Data terdistribusi normal	Data tidak terdistribusi normal
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	Varian data Homoskedastis	Varian data Heteroskedastis
Woolridge test	Model tidak autokorelasi	Model autokorelasi
	<10	≥10
Variance Inflation Factor (VIF)	Data tidak multikolinear	Data bermasalah multikolinear

Sumber: Data diolah (2024)

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dalam penelitian data panel perlu dilakukan pemilihan model terlebih dahulu. Umumnya terdapat tiga pendekatan model yang di antaranya adalah *Common Effects* atau *Pooled Effects (PE)*, *Fixed Effects (FE)*, dan *Random Effects (RE)* (Sihombing, 2021). Terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan untuk menentukan model yang akan digunakan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Model Regresi Data Panel

Metode Pengujian	Perbandingan Model	H0	H1
Chow Test	PE dan FE	PE	FE
Lagrange Multiplier (LM) Test	PE dan RE	PE	FE
Hausman Test	FE dan RE	RE	FE

Sumber: Data diolah (2024)

Setelah dilakukan pemilihan model, perlu dilakukan tes *Goodness of Fit (GOF)* guna menilai seberapa cocok model tersebut dengan serangkaian observasi (Narimawati & Sarwono, 2022). Detail uji GOF yang dimaksud dijelaskan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Goodness of Fit

Uji GOF	H0	H1
Uji Parsial	Variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh	Variabel Independen secara parsial berpengaruh
Uji Simultan	Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh	Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh

Sumber: Data diolah (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran informasi secara ringkas, pembahasan diawali dengan analisis deskriptif atas setiap variabel dalam penelitian sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tabel Deskripsi Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kemiskinan	11,93	31,33	18,38	4,73
Upah Minimum Provinsi	837.500	3.516.700	2.031.122	660.474,1
Laju Pertumbuhan PDRB	-15,74	21,76	5,00	4,37
Indeks Pembangunan Manusia	55,55	72,80	66,37	3,84

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan terendah di antara 10 Provinsi tersebut sebesar 11,93% yaitu provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dan tertinggi sebesar 31,33% yaitu provinsi Papua pada tahun 2013. Tingkat Kemiskinan secara keseluruhan tiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan suatu perbaikan. Perbaikan juga terjadi pada kenaikan IPM setiap tahunnya, IPM terendah yaitu Provinsi Papua dengan 55,55 pada tahun 2012 dan tertinggi yaitu provinsi Aceh sebesar 72,8 pada tahun 2022.

Upah Minimum Provinsi terendah sebesar Rp 837.500 pada provinsi Gorontalo tahun 2012 dan tertinggi sebesar Rp 3.516.700 pada provinsi Papua tahun 2021. UMP selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 di mana UMP tetap jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 (Tridiani & Tanur, 2022). Sementara Laju Pertumbuhan PDRB kerap fluktuatif namun cenderung naik. Pertumbuhan terendah yaitu sebesar -15,74% pada provinsi Papua tahun 2019 karena adanya penurunan produksi tambang di Freeport (Putri, 2020) dan tertinggi sebesar 21,76% pada provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 dimana merupakan yang terbaik di kancah nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor luar negeri yang tumbuh hingga 289 persen (Databoks, 2016).

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik bahwa model lolos uji heterokedastisitas dan uji multikolienar namun tidak lolos uji normalitas dan uji autokorelasi sebagaimana pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Prob > χ^2	Interpretasi
Skewness and Kurtosis Tests	0,0000	Tidak Terdistribusi Normal
Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test	0,0531	Homoskedastis
Woolridge test	0,0001	Autokorelasi
Variance Inflation Factor (VIF)	VIF	Interpretasi
	1,09	Tidak Multikolienar

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil pengujian model regresi data panel yang terbaik yaitu menggunakan model Random Effect atau RE dapat terlihat pada tabel 8.

Tabel 8. Pengujian Model Regresi Data Panel

Metode Pengujian	Perbandingan Model	Prob	Model Terpilih
Chow Test	Pooled Effect dan Fixed Effect	0,0000	Fixed Effect
Lagrange Multiplier (LM) Test	Pooled Effect dan Random Effect	0,0000	Random Effect
Hausman Test	Fixed Effect dan Random Effect	0,2693	Random Effect

Sumber: Data diolah (2024)

Namun berdasarkan uji asumsi klasik, model tidak memenuhi uji normalitas dan uji autokorelasi. Maka untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan model Generalized Estimating Equation (GEE) (Sihombing, 2021). Hasil regresi dari model GEE tersaji sebagaimana pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	Prob
Cons	50,10	0,000
Upah Minimum Provinsi	2,48	0,000
Laju Pertumbuhan PDRB	0,01	0,469
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	-1,02	0,000
Prob > χ^2		0,000

Sumber: Data diolah (2024)

Adapun hasil regresi pada tabel 7 memiliki bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 50.1 + 2.48LnUMP_{it} + 1.02PDRB_{it}$$

Hasil regresi sebagaimana pada tabel 7 menunjukkan Prob > chi2 berada di bawah nilai alpha yakni sebesar 0,000. Yang berarti secara simultan, Upah Minimum Provinsi, Laju Pertumbuhan PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi mempengaruhi secara signifikan Tingkat Kemiskinan di 10 Provinsi tersebut. Uji secara parsial menunjukkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi berpengaruh signifikan sementara secara parsial Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Uji parsial yang dilakukan pada Upah Minimum Provinsi menunjukkan hasil bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang berarti kenaikan UMP akan membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dimana kenaikan UMP sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 2,48%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Campos-Vazquez & Esquivel (2023) dan Pamungkas & Suman (2017). Dalam penelitian tersebut, kenaikan upah minimum mengakibatkan tingkat pengangguran yang bertambah sehingga tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pengangguran tersebut diakibatkan oleh kenaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tidak dapat mengatasi penambahan biaya operasional dampak dari kenaikan UMP (Pratama, 2022).

Hasil penelitian serupa dengan teori *neoclassical*, yang menyatakan respon perusahaan terhadap kenaikan upah adalah melakukan pemberhentian kerja atau mengganti tenaga kerja yang lebih murah (Giuliano, 2009). Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum menjadi beban bagi pelaku usaha. Biaya produksi yang dikeluarkan menjadi lebih besar sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi termasuk dalam hal tenaga kerja.

Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan hasil bahwa Laju Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiny (2018) dan Astuti (2018). Temuan World Bank (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Todaro menyatakan hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mempertimbangkan ketimpangan pendapatan (Todaro & Smith, 2012).

Badan Pusat Statistik Papua (2018) menyebut faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua walaupun pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat adalah karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. Fenomena ini semakin memperkuat teori bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan upaya perbaikan kesejahteraan sebaiknya dilakukan sistematis serta melihat detail permasalahan secara rinci, sinergi lintas sektor sangat diperlukan dalam hal ini.

Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Sementara uji parsial pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di 10 provinsi tersebut. Di mana kenaikan IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,02%. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Panjawa et al., (2023), dan Prasetyoningrum (2018). Penurunan tingkat kemiskinan karena kenaikan IPM mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan produktivitas maka pendapatan juga turut meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang layak (Panjawa et al., 2023). Penelitian terkait IPM dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Papua menunjukkan hasil yang sejalan. Angka Harapan Hidup (AHH) di Papua mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 64,31% menjadi 65,79% pada tahun 2020. AHH merupakan salah satu parameter dalam penghitungan IPM di bidang kesehatan selain tingkat ketercukupan nutrisi, tingkat fertilitas, dan tingkat mortalitas anak di bawah umur lima tahun (Florescia & Karmini, 2021).

Hasil ini sesuai dengan pendekatan *Human Development*, yang mana semakin baik kualitas hidup manusia maka akan semakin mampu untuk dapat menerima manfaat dalam pertumbuhan ekonomi. Alhasil, memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di Papua sebagai provinsi termiskin. Indikator terkait kualitas hidup manusia di Papua masih rendah walaupun PDB per kapitanya tinggi. Dikutip dari Bappenas (2015), Provinsi Papua memiliki peringkat terendah dalam hal rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi kasar. Bahkan dalam bidang kesehatan, indeks persentase balita yang proses kelahirannya ditolong tenaga kesehatan sangat rendah sementara peringkat gizi buruk di Papua tertinggi.

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan, Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *neoclassical* yakni karena adanya pemberhentian kerja membuat tingkat pengangguran meningkat sehingga dampaknya kemiskinan pun juga meningkat (Giuliano, 2009). Dalam penelitian ini kenaikan PDRB menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan sebagaimana telah disampaikan teori bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat akan berdampak buruk bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan terkadang pertumbuhan yang ada akan menyebabkan masyarakat miskin terlupakan dan dianggap tidak penting (*marginalized*) dalam perubahan struktural pertumbuhan modern (Todaro & Smith, 2012).

Upah Minimum yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja namun memiliki dampak naiknya tingkat kemiskinan. Pemerintah harus meninjau kembali kenaikan UMP pada sepuluh provinsi tersebut agar tetap berada pada titik keseimbangan sehingga kenaikan UMP tidak mengakibatkan naiknya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini PDRB, juga harus memperhatikan ketimpangan yang ada sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Bidang-bidang yang menjadi komponen penghitungan dalam IPM (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Terbukti kenaikan IPM dapat menurunkan kemiskinan.

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat keterbatasan data pada tahun 2023 dan penggunaan variabel yang masih terbatas, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang berkaitan dengan capaian pembangunan manusia yang berdasar pada komponen dasar kualitas hidup. Seperti tingkat Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pengeluaran sehingga dapat melihat komponen yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga pemerintah dapat mengadakan program berkaitan yang tepat sasaran. Kesepuluh provinsi termiskin di Indonesia layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan jika pemerintah sungguh-sungguh untuk keluar dari *Middle Income Trap* pada tahun 2036.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*.
- Aprilia, R. D. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2008-2013*.
- Astuti, W. (2018). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor). *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 1(3).
<https://doi.org/10.32493/JJSDM.v1i3.1286>

- Bappenas. (2015). *Soal Ketimpangan Pembangunan, Papua Perlu Perhatian Khusus*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/soal-ketimpangan-pembangunan-papua-perlu-perhatian-khusus>
- Campos-Vazquez, R. M., & Esquivel, G. (2023). The Effect of the Minimum Wage on Poverty: Evidence from a Quasi-Experiment in Mexico. *The Journal of Development Studies*, 59(3), 360–380. <https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2130056>
- Databoks. (2016). *Ekonomi Nusa Tenggara Barat Menjadi yang Terbaik di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/01/ekonomi-nusa-tenggara-barat-menjadi-yang-terbaik-di-indonesia>
- Florencia, E., & Karmini, N. L. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua . *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* .
- Giuliano, L. (2009). *Minimum wage effects on employment, substitution, and the teenage labor supply: Evidence from personnel data* .
- Madan, S. (2014). Human Development and Poverty – a Perspective Across Indian States. *Statistika*.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ecoplan : Journal Of Economics And Development Studies*, 2(2), 77–89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20>
- Narimawati, U., & Sarwono, J. (2022). *Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis Partial Least Square Dalam Pls Sem*.
- Pamungkas, P. A., & Suman, A. (2017). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016*.
- Panjawa, J. L., Sugiharti, R., Kurniawan, M. A., & Jalunggono, G. (2023). *Is there any relation between human development and poverty in Eastern Indonesia?* 020025. <https://doi.org/10.1063/5.0154798>
- Paramita Rastri. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Sukmawati, U. Sulia* .
- Pratama, W. P. (2022). *UMP 2023 Naik 10 Persen, Bakal Banyak Perusahaan PHK Karyawan?*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/9/1601247/ump-2023-naik-10-persen-bakal-banyak-perusahaan-phk-karyawan>
- Prayoga, L. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*.
- Putri, C. P. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Papua 2019 Minus 15,72%, Gegara Freeport*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200205142934-4-135483/pertumbuhan-ekonomi-papua-2019-minus-1572-gegara-freeport>
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2). <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.113-120>
- Setiawan, H. (2014). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta*.
- Sihombing, P. R. (2021). *Corat Coret Catatan Statistisi Pemula*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Škare, M., & Pržiklas Družeta, R. (2016). Poverty And Economic Growth: A Review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>

- Suryani, Sholiha, S. F., Sendi, M., & Silalahi, P. R. (2023). Pengaruh Ipm Dan Pdrb Terhadap Jumlah Penduduk Ekonomi Tingkat Rendah (Miskin) Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1).
- Todaro, M. P. , & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Tridiani, C., & Tanur, E. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Transisi Tenaga Kerja Sektor Formal. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, .
- Utomo, G. P. (2022). *Penetapan Upah Minimum Provinsi Yang Berkeadilan Bagi Pekerja Dan Pengusaha*.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhikemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahunterakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)* .